

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja pada lingkungan instansi pemerintah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi pusat perhatian karena semakin tingginya kesadaran masyarakat atas pengelolaan anggaran. Anggaran adalah estimasi capaian kinerja suatu organisasi selama jangka waktu tertentu yang diukur menggunakan parameter keuangan. Adapun pengertian anggaran sektor publik pada dasarnya yaitu mencakup beragam kegiatan serta program yang telah direncanakan untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) mencakup sistem akuntabilitas hukum yang memadai, jelas dan terukur sehingga pengelolaan dan pembangunan pemerintahan dapat dilaksanakan secara efisien, bersih dan bertanggung jawab. Keberhasilan program bukan hanya dilihat dari hasil yang dicapai melainkan proses serta dampak yang nantinya ditimbulkan (Y. Bantali 2022). Menurut Wakhid Yuliyanto et al. (2023) instansi pemerintah wajib menyusun peninjauan terhadap laporan keuangan dilakukan secara periodik setiap tahun guna memantau ketetapan realisasi anggaran. Laporan tersebut juga digunakan untuk membandingkan kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Seluruh aspek penatausahaan keuangan harus dilaksanakan secara sistematis dan berpedoman pada ketentuan perundang undangan, serta tetap memperhatikan nilai keadilan dan kepatutan. Hal ini menjadi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pengelolaan yang baik akan mendorong alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran serta mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan. Selain itu, pengelolaan tersebut juga berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, dengan memastikan bahwa setiap kebijakan publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan sumber daya yang lebih kompetitif di periode mendatang (Umum et al. 2022).

Instrumenn pengukuran kinerja instansi pemerintah pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang digunakan sebagai sarana manajemen organisasi, guna membantu pihak publik mengevaluasi sejauh mana tingkat pencapaian strategi, baik melalui indikator keuangan maupun nonkeuangan (Ramadhani et al. 2022). Terdapat tiga alasan mendasar dalam pelaksanaan pengukuran kinerja sektor publik. Pertama, sebagai sarana peningkatan mutu layanan pemerintah. Kedua, sebagai instrumen pengambilan keputusan dan distribusi aset yang tepat sasaran. Ketiga, sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat sekaligus upaya memperbaiki hubungan komunikasi di tingkat institusi. Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi akuntabilitas sebuah lembaga pemerintahan salah satunya yaitu menggunakan konsep *Value For Money* (Sanjaya 2019).

Organisasi sektor publik diwajibkan untuk memperhatikan *Value for Money* dalam pelaksanaan kegiatannya. Tuntutan tersebut sejalan dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menetapkan bahwa pengelolaan keuangan negara dan daerah harus dilakukan secara ekonomis, efisiensi, efektivitas, serta bertanggung jawab yang didasarkan dengan asas keadilan (Hatta et al. 2021). Menurut Mardiasmo (2009) dalam Erawan et al. (2019) *value for money* adalah konsep pengelolaan kinerja organisasi sektor publik yang memiliki tiga elemen utama yaitu : ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Tujuan utama *value for money* adalah menjamin akuntabilitas dari lembaga keuangan kepada masyarakat. Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban instansi untuk melaporkan hasil dari pelaksanaan misinya, baik berupa pencapaian maupun hambatan, guna memenuhi target yang telah ditentukan melalui proses pelaporan secara berkala (Erawan et al 2019).

Kabupaten Jember sebagai salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, memiliki luas wilayah sekitar 3,293,34 km² (wikipedia). Wilayah ini dikenal memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, didukung oleh keberagaman alam seperti perkebunan tembakau, pantai yang indah, serta berbagai budaya dan agro wisata yang menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara.

Potensi tersebut menjadikan Jember sebagai destinasi strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata. Letak geografis Kabupaten Jember yang relatif strategis juga turut menjadi nilai tambah dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata di daerah tersebut. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai salah satu instansi publik daerah yang menjadi wujud dari upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan, serta pengembangan sektor pariwisata pada masing-masing daerah. Secara khusus, Dinas Pariwisata Kabupaten Jember berfungsi sebagai salah satu unit kerja yang termasuk dalam struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui tugas-tugas tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini berperan aktif dalam mempromosikan potensi wisata lokal, meningkatkan daya tarik destinasi, serta mendukung perekonomian masyarakat melalui potensi yang ada.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pengukuran kinerja berdasarkan konsep *Value For Money*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan capaian antar instansi, di mana sebagian masih menghadapi berbagai hambatan dalam mewujudkan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Di sisi lain, beberapa penelitian juga menunjukkan keberhasilan instansi dalam memenuhi seluruh indikator *Value For Money* secara baik. Pada penelitian Bantali et al. (2024) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berada pada kategori ekonomis, namun tidak efisien. Penelitian Novita Sari (2022) juga menemukan bahwa Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru telah mencapai tingkat ekonomis, tetapi mengalami penurunan efisiensi dan fluktuasi efektivitas. Sementara itu, penelitian Sanjaya (2019) menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah memenuhi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan setiap instansi sektor publik dapat berbeda-beda tergantung pada karakteristik organisasi dan pengelolaan anggarannya.

Data menunjukkan kunjungan wisatawan meningkat dari 745.952 pada tahun 2023 menjadi lebih dari 1 juta lebih kunjungan pada tahun 2024 dan 2025 (Radar Jember). Peningkatan jumlah wisatawan tersebut pada dasarnya memiliki potensi

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat semakin tinggi jumlah kunjungan maka semakin besar kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam Mahsun (2018) Konsep *value for money* ini sangat penting bagi pemerintah, salah satunya yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagai pemberi layanan kepada masyarakat yang memberikan manfaat berupa, efektifitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, mengendalikan pemborosan dan meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien dalam seluruh kegiatan operasional pemerintah guna mewujudkan efisiensi biaya pelayanan melalui pemanfaatan sumber daya yang optimal, efektif, dan berkelanjutan, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, serta meningkatkan publik *cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas publik dalam mewujudkan prinsip *good governance*. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana kondisi kinerja keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yang hingga saat ini belum pernah dianalisis menggunakan pendekatan *value for money* pada periode 2023–2025. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melaksanakan penelitian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dengan Judul **“ANALISIS PENGUKURAN KINERJA BERDASARKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PERIODE 2023-2025”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “Bagaimana analisis pengukuran kinerja berdasarkan konsep *value for money* pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember periode 2023-2025?”

1.3 Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengukuran kinerja berdasarkan konsep *value for money* pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember periode 2023-2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan di atas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan, wawasan serta pengalaman peneliti, sehingga meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan permasalahan terkait pengukuran kinerja dengan berdasarkan konsep *value for money* pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan memberikan bahan evaluasi untuk pengukuran kinerja, sekaligus memberikan masukan atau perspektif bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan utama bagi peneliti berikutnya yang ini mengembangkan studi serupa di bidang yang relevan.